

FAKTOR PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2015

Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang
Program Studi Ilmu Pemerintahan
email: kariena.febriantin@gmail.com
Kariena Febriantini, S.IP., M.IPol.

Abstract

Regency of Purwakarta in 2008 under the leadership of the Mayor, Dedi Mulyadi until this time has been the improvement of infrastructure development and implementation of the principles of good governance principles. The main question of this research is how governance in Purwakarta district related to the potential factors that determine the ability of government from the years 2008 until 2015. This research uses qualitative methods. Research result shows that the factor of leadership and leadership is a major and dominant factor in determining the success of governance government.

Key Words: *Governance, Good Governance.*

Abstrak

Kabupaten Purwakarta pada tahun 2008 di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi hingga saat ini telah mengalami perbaikan pembangunan infrastruktur dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purwakarta terkait faktor-faktor potensial yang menentukan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun 2008 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemimpin dan kepemimpinan merupakan faktor yang utama dan dominan dalam menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: *Governance, Good Governance.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kemampuan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purwakarta ditandai dengan pencapaian kinerja pemerintahan yang lebih baik, yakni semenjak tahun 2008 hingga tahun 2015. Rentang waktu inilah yang menjadi *focus timing* dalam penelitian ini.

Dalam data tentang kinerja pemerintahan yang baik di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari beberapa bidang pencapaian, khususnya melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pencapaian kemampuan ekonomi daerah yang bisa dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pencapaian pada indikator-indikator pemerintahan ini menunjukkan posisi yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

Begitupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dalam dasawarsa terakhir menunjukkan pencapaian yang lebih baik, namun Kabupaten Purwakarta sepertinya masih harus berupaya keras untuk mengoptimalkan kembali upaya dalam peningkatan IPM-nya, karena peringkat IPM Kabupaten Purwakarta masih di posisi bawah dibandingkan 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat. Namun adanya pencapaian IPM ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta berada pada level tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dalam dasawarsa terakhir karena mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik, melalui tiga elemen pokok dalam IPM yakni berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat ekonomi masyarakat.

Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta dalam dasawarsa terakhir menunjukkan kinerja atau *trend* yang positif. PAD mengalami kenaikan signifikan sebagai dampak dari perbaikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Terdapat peningkatan kecil sebesar 20% pada tahun 2009 dan peningkatan sedang, sebesar 65% pada tahun 2014. Presentase peningkatan PAD selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan peningkatan landai hingga meningkat tajam. Hal ini

menunjukkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Purwakarta pada elemen ekonomi daerah berjalan dengan baik.

Melihat data PDRB yang menunjukkan kemampuan ekonomi makro di Kabupaten Purwakarta menunjukkan hasil yang baik. Dari tabel di bawah ini, menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya serta persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2012-2014 mampu melebihi persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta cenderung positif ke arah peningkatan.

Berbicara mengenai tata kelola pemerintahan, maka akan terkait dengan berbagai aspek yang menjadi penentu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia.

Dari beberapa kepemimpinan yang telah berjasa bagi Purwakarta, membuat Kabupaten Purwakarta semakin diperhitungkan. Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi semakin bersinar dan berjaya baik di tingkat lokal, regional maupun internasional dengan slogan Purwakarta Istimewa dan Jaya dibuana semakin meneguhkan komitmennya dalam membangun Purwakarta. Indikator keistimewaan Purwakarta sangat jelas dan secara kasat mata dapat dilihat dan saksikan publik, dibidang infrastruktur Purwakarta terkenal dengan jalan *hotmix*nya sampai ke pelosok pedesaan termasuk Kecamatan Sukasari yang dikenal paling jauh dari pusat kota. Di bidang kesehatan, Pemerintah Purwakarta memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga tidak mampu, begitupun penyediaan sarana kesehatan berupa puskesmas yang megah dan tersedia layanan gawat darurat 24 jam. Di bidang birokrasi, Bupati Purwakarta membuat kultur baru para birokrat dengan Kenduri Cinta Birokrasi, di mana ada tradisi baru dalam dunia birokrasi dalam bentuk atmosfer pelayanan publik yang humanis. Dan begitu pula diberbagai bidang lainnya, terdapat berbagai program yang terlaksana dengan baik.¹

¹ Tulisan ini dimuat oleh Majalah Lampar Edisi September 2015 Hlm. 8-9. Dede Supendi adalah Guru SDN 2 Tanjungsari dan Wakil Kepala SMPN Satu Atap 2 Sukajadi

Periode sebelum menjabat menjadi Bupati, Beliau pernah menjabat Wakil Bupati, Beliau saat itu banyak mengunjungi berbagai pelosok Purwakarta serta mendalami tata kelola pemerintahan daerahnya. Pengalaman selama lima tahun itu telah menginspirasinya menetapkan visi pembangunan Purwakarta Berkarakter (Visi Berbasis Kearifan Lokal dan Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta).

Bupati melihat Purwakarta telah berkembang pesat dan masyarakatnya berkembang dinamis dalam tingkat heterogenitas tinggi. Namun dia melihat sisi lain dari perkembangan tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengubah pola hidup masyarakat yang instan menjadi alami. Pendekatan kultur budaya harus dicanangkan sebagai roh pembangunan untuk mendongkrak perekonomian pedesaan. Dilihat dari sisi lain, Pakar Komunikasi politik UI mengatakan:

Bupati Purwakarta telah berhasil berpikir *out of the book*, semuanya berasal dari originalitas pemikirannya dalam setiap pidatonya. Inilah yang disebut kebebasan berpikir yang mampu melahirkan hal-hal baru dalam kehidupan. Sangat luar biasa *out of the book*, orang seperti ini akan mampu memimpin dalam skala yang besar.²

Bupati Purwakarta, dinilai sebagai sosok pemimpin Tanah Air yang memiliki jiwa, semangat dan menjadi panutan bagi masyarakat luas. Dia mengatakan bahwa “Generasi muda boleh menguasai teknologi, tapi tidak boleh meninggalkan budaya,” pidatonya di markas PBB, Selasa, 18 Agustus 2015, di mana dia menyampaikan pandangannya terkait kebudayaan dengan tema “Kepemimpinan Moral dan Inovatif” dengan visi layanan, kewirausahaan dan *leadership*.³

Kepemimpinan Bupati Purwakarta menawarkan gagasan dan implementasi yang baru yakni percaya akan tradisi lokal warisan nenek moyang dan budaya sebagai urat nadi kehidupan. Oleh karena itu, dia dianugerahi apresiasi Maecenas oleh Federasi Teater Indonesia (FTI) sebagai tokoh budaya pada Desember 2015, yang di mana penghargaan ini diberikan karena dia

Kec.Pondoksalam.<http://pendidikan.purwakartakab.go.id/index.php/artikel/view>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

²<http://www.nongkrongnews.com/2015/06/indonesia-butuhpemimpin-otentik-bupati.html>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

³ <http://www.riauonline.co.id/2015/08/21/bupatipurwakarta-pukau-ribuan-orang-saat-pidato-di-pbb>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

terbukti dapat melambungkan nama Purwakarta di kancah nasional dan internasional berkat karakter kepemimpinannya yang berbudaya.⁴

Dari uraian fakta-fakta tersebut, ada sebuah pertanyaan dibenak peneliti, apakah faktor kepemimpinan Bupati Purwakarta mampu menjadi faktor penentu kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik saat ini di Kabupaten Purwakarta? Karena di sisi lain selamakepemimpinan Beliau, banyak sekali kontra, baik berupa kecaman dan aksi demo masyarakat yang disebabkan karena kerangka pemahaman/pernyataan yang Beliau sampaikan menimbulkan kontroversi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengenai Faktor Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2008-2015, yang di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena tiga pertimbangan yaitu untuk memahami konteks, mengungkapkan fenomena yang belum terantisipasi dan mempelajari pola atau model.⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian di bagi menjadi tiga kelompok besar dalam tata kelola pemerintahan yaitu aktor pemerintah, pengusaha/swasta, dan masyarakat sipil. Untuk melakukan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu *reading the transcript, categorizing and contextualizing*.⁶

3. Kerangka Teori

Teori *governance* dalam konteks pemerintahan adalah suatu sistem, mekanisme atau proses tata kelola yang dirancang dengan tujuan yang baik, yang memastikan untuk pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan yang baik, dengan semaksimal mungkin menghindari dampak

⁴ <http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=18&date=2016-03-2016>.

⁵ J. W. Creswell. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approache*. Third edition, Los Angeles: Sage Publication, hlm. 181-185.

⁶ Joshep A Maxwell. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. London, SAGE Puplications, hlm. 78-79.

negatifnya. Rhodes⁷ menyebut karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai sebuah komponen yang normatif, yang meliputi:

..an effective public service and independent judicial system and legal framework to enforce contracts; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure, and a free press.

Begitupun, *United Nations Development Programme* (UNDP)⁸ mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai:

Good governance is among other things, participatory transparent, and accountable. It is also effective and equitable, and it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus in society and that the allocation of development resources. Its definition includes the following characteristics of good governance; participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equality, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision.

Lebih lanjut, PBB melalui *United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (UNESCAP)⁹, menjelaskan karakteristik utama *good governance* meliputi:

..participatory, consensus oriented inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption in minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decisionmaking. It is also responsive to the present and future needs of society.

Terkait faktor potensial dan dominan yang menentukan tata kelola pemerintahan, Dudley dan Richardson (2000:18) menyatakan bahwa *individuals*, perseorangan atau pemimpin mampu mempengaruhi kemampuan mengelola tata pemerintahan dengan baik atau tidak. *Individuals* juga merupakan faktor penentu utama terjadinya perubahan atau dinamika kebijakan publik. Mereka memberikan contoh peran dan arti penting seorang Menteri yang mampu membentuk sebuah perubahan kebijakan di Inggris. Menteri sangat mungkin memiliki perbedaan pemikiran dengan para pihak yang lain sehingga memiliki peran dan potensi yang besar untuk melakukan perubahan.

⁷ R.A.W. Rhodes. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham, Open University Press, hlm. 49.

⁸ UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. Melalui (<http://magnet.undp.org/policy/chapter1.html>). Diakses pada tanggal 11 Mei 2016.

⁹ UNESCAP (*United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific*), (<http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance,asp>.)

Sependapat dengan Dudley dan Richardson, Hetifah J. Sumarto (2009:84) meyakinkan bahwa pemimpin dengan tipe kepemimpinan yang baru, mampu menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Dengan menunjukkan berbagai *benchmarking* studi tentang prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia, dia menyimpulkan bahwa pemimpin dan kepemimpinan menjadi salah satu faktor kunci sukses mengelola pemerintahan yang baik. Pimpinan daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) maupun pemimpin masyarakat (tokoh-tokoh informal, tokoh adat, dan lain-lain) memegang peran yang sangat penting sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Kata kunci kepemimpinan baru adalah pemimpin yang memiliki visi dan dapat dipercaya.

Merilee S. Grindle (2007:170-171) menegaskan bahwa kepemimpinan *entrepreneurship* menjadi ciri kepemimpinan yang efektif untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Grindle berpandangan bahwa pemimpin memiliki kesempatan dan kapasitas yang paling luas untuk melakukan berbagai macam atau reformasi ke arah yang lebih baik, lebih kompetitif. Pemimpin memiliki kesempatan yang luas untuk menerapkan berbagai reformasi dan perubahan sehingga menjadi faktor utama yang menentukan ke arah mana sesungguhnya reformasi pemerintahan akan dibawa.

Babajanian (2008:375-377) secara menarik menjelaskan bahwa kemampuan seorang pemimpin seperti Walikota di Armenia untuk melakukan strategi-strategi informal mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kemajuan masyarakat. Larsen (2002:195-196) juga menegaskan bahwa kepemimpinan politik akan menjadi faktor pendukung utama untuk menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Hal ini didukung oleh pendapat Michele C. Bligh (2009:641), yang menegaskan bahwa:

Integrity, addresses the finding that leaders tend to be honest and trustworthy, inspiring others to respect them and trust them with important decisions and resources. Leaders are often variously describes as loyal, responsible, dependable, and honest. These characteristics inspire the confidence of others and provide evidence that leaders are authentic and have the best rests of the group at heart. This is in stark opposition to individuals who use the efforts and resources of the group for their own prosperity or power and manipulate the group's time and money for their own personal gain.

Karakter pemimpin yang kuat merupakan salah satu aspek yang berkembang dalam teori kepemimpinan, di mana karakter pemimpin (integritas) yang baik menentukan keberhasilan penyelenggaraan organisasi/pemerintahan. Beberapa ahli seperti Kouzes, Posner dan Silvestri

menyebut kepemimpinan yang tegas semacam ini sebagai sebuah *strong leadership* (Kouzes, J & Posner, 2007:25-29 & Silvestri, 2007:49). *Strong leadership* ini memerlukan pemimpin yang memiliki karakter yang kuat dan integritas yang solid. Dengan *strong leadership* maka langkah-langkah menuju sukses kepemimpinan akan mudah dicapai. Kouzes dan Posner menegaskan:

Everyone wants to be fully confident in their leaders, and to be fully confident they have to believe that their leaders are individuals of strong character and solid integrity. To be credible in action, leaders must be clear about their beliefs; they must know what they stand for. Then they must put what they say into practice, they must act on their beliefs and “do”. (Kouzes and Posner, 2007:26)

Selanjutnya, pemimpin yang peduli, yang mampu merasakan perasaan atau penderitaan masyarakat yang dipimpinnya akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan kepemimpinannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Michele C. Bligh (2009:640) menyatakan bahwa:

Socialbility is defined as a leader’s desire for high quality social relationships and the ability to maintain and restore positive relationships in difficult times that often involve adversity and crisis. Across studies, leaders often demonstrate the ability to be friendly, extroverted (outgoing), courteous, act full, and diplomatic. In addition, leaders tend to be sensitive to the needs of others, even at the cost of attending to their own needs. In short, leaders care about the interests of others and put others interests before their own. Leaders have good interpersonal skill that communicate their concern for others, and they work to smooth out conflicts and disagreements to maintain the group’s social harmony.

Lalu, Hoy & Tarter (2010:1) secara teoritik menyatakan kepemimpinan komplementer ini mirip dengan kepemimpinan situasional, di mana situasi, lingkungan atau konteks memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas kepemimpinan. Dengan demikian, pemimpin menjadi faktor kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan, namun keberhasilan pemimpin juga harus diikuti dengan dukungan bawahan yang memadai dan dukungan lingkungan yang kondusif. Artinya pemimpin yang inovatif hanya akan berhasil kalau didukung oleh bawahan dan lingkungan yang kondusif (Mas’udi, 2012:14-16).

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian khususnya melalui wawancara mendalam dapat diterangkan bahwa sebagian besar informan memberikan penegasan bahwa faktor yang paling besar dalam menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purwakarta adalah faktor pemimpin (*leader*) dan kepemimpinan

(*leadership*). Faktor pemimpin menyangkut kemampuan personal, karakter atau sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sedangkan kepemimpinan adalah *exercise* atau penerapan dari kemampuan personal, karakter atau sifat tersebut dalam kehidupan organisasi yang nyata. Dalam konteks ini, faktor pemimpin dan kepemimpinan meliputi lima hal pokok yaitu faktor ideologi pemimpin, faktor inovasi pemimpin, faktor motivasi pemimpin, faktor ketegasan pemimpin, faktor pemimpin rendah hati dan faktor kepemimpinan saling melengkapi (*complementary leadership*).

Faktor pemimpin dan kepemimpinan ini menjadi faktor dominan karena pemimpin dan kepemimpinan inti dari seluruh proses manajemen pemerintahan dan faktor pemimpin dan kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin dan seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, kekuatan dan ketangguhan emosional, spiritual dan intelektual untuk mempengaruhi aktifitas, perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian dan sasaran yang ingin dicapai bersama. Dan pemimpin juga harus mempunyai landasan filosofi religi dan kearifan lokal yang diterjemahkan dalam Visi, Misi dan Program serta di implementasinya menjadi sesuatu realitas yang dipahami, dimengerti serta hasilnya memenuhi keinginan, kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut seluruh informan dalam penelitian ini, ideologi pemimpin menjadi dasar utama dalam menentukan kemana arah pemerintahan dan pembangunan akan dibawa. Beberapa informan penelitian menyatakan secara tersirat bahwa cara berpikir seorang pemimpin akan menentukan apa yang akan terjadi dan kemana arah pemerintahannya itu di bawa. Mereka mengatakan bahwa sosok Bupati merupakan sosok yang cerdas, punya pemikiran cerdas dan mampu menciptakan inovasi dan kreasi dalam kepemimpinannya.¹⁰

Berbicara mengenai pola pikir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta mengkritisi bahwa pola pikir dan kecerdasan Bupati sayangnya tak semuanya mampu diaktualisasikan para pembantunya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bupati Purwakarta, dapat dikemukakan beberapa perbedaan pemikiran antara Bupati Purwakarta dengan Kepala Daerah/Bupati Kabupaten lain di Indonesia terkait apa yang telah ia lakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berbeda dengan kepala daerah yang lebih menonjolkan sisi sosok politisnya, Bupati Purwakarta

¹⁰ Hasil analisis dan kesimpulan peneliti dari semua informan penelitian yang diwawancarai dari tanggal 29 Maret hingga 13 April 2016.

justru menanggalkan kesan-kesan sebagai politisi itu. Kemunculannya di panggung politik Jawa Barat, seperti fenomena tersendiri di mana dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagai seorang bupati/kepala daerah, Bupati Purwakarta lebih mempertontonkan sebagai sosok pemimpin informal.

Gaya memimpinnya yang nonkonvensional dengan mengembangkan pola diplomasi seni budaya menjadikan Bupati Purwakarta mampu membawa angin segar bagi peta perpolitikan Jawa Barat. Pemimpin, tidak harus rigid, kaku, formal dan konvensional. Hampir dua periode kepemimpinannya, Bupati Purwakarta mampu membuat berbagai macam terobosan kebijakan sehingga Purwakarta mengalami berbagai macam kemajuan. Tidak saja secara ekonomi melalui pembangunan fisik-material, tetapi juga secara kebudayaan melalui pembangunan spiritual-immaterial. Untuk itu semua, Bupati Purwakarta memperoleh sorotan internasional sebagai salah satu dari “Pemimpin Muda Inspiratif”.

Dalam ranah Jawa Barat, Bupati Purwakarta mampu menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin politik yang sukses melalui jalur diplomasi seni budayanya (*soft diplomatic*). Bukan sebagai pencitraan politik, namun karena memang dirinya memiliki kesadaran otentik akan perlunya seni budaya menempati posisi penting dalam ranah kehidupan. Apa yang dilakukan Bupati Purwakarta dengan diplomasi lunaknya, menjadi inspirasi (antitesa) terhadap pandangan masyarakat yang terlanjur melihat politik sebagai tempat orang saling menebar kebencian, penuh kegaduhan, gontok-gontokan yang berakhir dengan kekerasan. Melalui diplomasi seni budaya, Bupati Purwakarta ingin mengubah stigma di atas, dan membalikan logika keliru dengan memperkenalkan semangat baru bahwa politik ialah tempat orang saling mengapresiasi, merdu bagai orkestra simponi, saling memuji dan anti kekerasan.

Mengenai gaya kepemimpinan Bupati Purwakarta yang dekat dengan masyarakat. Masyarakat Purwakarta mengenal bupatinya jauh sebelumnya telah dulu “blusukan”. Bagi masyarakat Purwakarta mungkin jauh sebelum Jokowi “blusukan” kemudian diikuti oleh Presiden SBY, namun kemasan dan namanya saja yang berbeda. Blusukan ala Bupati Purwakarta ini dikenal masyarakat Purwakarta dengan istilah “Gempungan”. Pendekatan kepada masyarakat dengan gempungan memang cukup efektif untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kesulitan rakyatnya. Gempungan di Purwakarta ibarat “magnet” menjaring simpatik masyarakat. Tapi tentunya harus dilandasi oleh dasar ibadah dan tulus ikhlas mengabdikan ke masyarakat.

Fenomena ini, kemungkinan akan diadopsi oleh para calon kepala pemerintahan maupun calon legislatif dalam upaya menjaring simpatik masyarakat.

Melansir sebuah lembaga survei bahwa tingkat pengenalan dan kesukaan masyarakat Purwakarta terhadap Bupati Purwakarta periode 2008-2013 diangka 90 persen hampir mendekati 100 persen.¹¹ Masyarakat mengenal dan menyukai gaya kepemimpinan Bupati Purwakarta dengan program Gempungan yang selama 2 periode kepemimpinannya kerap menyambangi masyarakatnya di 17 kecamatan. Di program gempungan itu Bupati membawa seabreg program pro rakyat seperti layanan kesehatan gratis dan asuransi warga miskin. Serta menampung aspirasi masyarakat.

Faktor Inovasi Pemimpin. Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah. Berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam sistem birokrasi akan mendorong daerah berkembang lebih maju. Inovasi juga menjadi salah satu jalan bagi daerah untuk meraih prestasi. Berbicara mengenai inovasi pemimpin, perwajahan Kabupaten Purwakarta berubah drastis sejak kepemimpinan Bupati Purwakarta. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, infrastruktur, pelayanan kesehatan dan sektor lainnya untuk kepentingan masyarakat dengan tetap berbasis spirit budaya. Kinerja nyata Bupati Purwakarta mengubah wajah Purwakarta lahir melalui ide-ide kreatif berbasis budaya kearifan lokal mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Faktor Motivasi Pemimpin “Melayani”. Motivasi pemimpin juga menjadi kunci sukses mengelola pemerintahan. Motivasi pemimpin yang semata-mata mengejar kekayaan, sehingga transaksional dalam konteks untuk mengembalikan modal yang banyak ketika meraih kursi jabatan Bupati atau Wakil Bupati akan membuat daerah tersebut tertinggal karena orientasi pemimpinnya hanyalah mencari uang dan memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya melalui berbagai cara. Banyak kepala daerah yang melakukan hal ini sehingga mereka harus berurusan dengan kasus hukum. Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta di awal pemerintahannya sudah sepakat dan komitmen untuk membela kepentingan rakyat, maka mereka sepakat tidak akan mengambil uang rakyat atau korupsi.

Salah satu contohnya motivasi memimpin “melayani” yang Bupati Purwakarta lakukan yakni ketika realisasi Janji Bupatinya saat kampanye dulu untuk menaikkan honor Kepala Desa

¹¹ Survei LSI Tahun 2013. Lembaga Survei Indonesia.

dan perangkatnya sebesar 20 persen sudah direalisasikan. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta dan akan berlaku tahun 2014. Hal tersebut mendapatkan reaksi positif dari sejumlah kepala desa dan perangkatnya.

Komitmen awal Bupati dan Wakil Bupati untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purwakarta menjadi titik awal, faktor pembangkit yang menyebabkan kota ini *progresif* dalam membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Komitmen untuk membela kepentingan masyarakat menjadi dasar komitmen dan perilaku awal untuk membangun Kabupaten Purwakarta. Kemampuan pemimpin untuk melakukan kebijakan secara proporsional dan profesional menjadi kunci dalam mengelola pemerintahan kabupaten.

Selanjutnya, Faktor Ketegasan Pemimpin. Dari semua informan penelitian di lapangan menyatakan bahwa Bupati Purwakarta adalah sosok yang tegas, Bupati sosok yang fokus pada visi dan misi yang diyakininya, sehingga siapapun yang tidak sejalan dengannya di tindak tegas dan dipersilahkan untuk minggir, Bupati Purwakarta merupakan sosok yang percaya diri, yakin dan tegas dengan pendapat dan pandangannya. Sebagian pegawai yang tidak mampu mengikuti ritme kerja Bupati tentu hal ini dipandang sebagai sesuatu yang berat, namun demikian bagi mereka yang pekerja keras, visioner dan bersemangat membangun Kabupaten Purwakarta maka kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dipandang sebagai momentum atau kesempatan untuk memperbaiki Kabupaten Purwakarta.

Faktor Pemimpin Rendah Hati. Pemimpin yang rendah hati membuat proses tata kelola pemerintahan yang berbasis pada *responsiveness* dan kesetaraan semakin mempermudah pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Bupati Purwakarta tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari masyarakatnya. Bahkan Bupati tidak segan-segan untuk langsung berkonsultasi atau berkomunikasi dengan rakyat. Bupati juga memiliki akses yang sangat luas pada tingkatan masyarakat *grass root*, sehingga semakin memperkuat kepemimpinannya.

Faktor Kepemimpinan Saling Melengkapi. Para informan menyatakan bahwa kemampuan tata kelola pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang baik bukan hanya karena kemampuan Bupati Purwakarta saja, tetapi juga karena dukungan yang kuat dari Wakil Bupati. Sosok Bupati dan Wakil Bupati ini saling melengkapi satu sama lain. Bupati dalam hal ini bertugas paling dominan, tidak hanya mem-*branding* daerah dan berbagai pekerjaan

manajerial, namun juga menciptakan kondisi dan peluang untuk kesuksesan kepemimpinannya. Wakil Bupati di sini perannya tidak terlalu terlihat karena Beliau jarang sekali terekspos ke media massa, dilihat dari latar belakangnya sebagai seorang birokrat murni yang senantiasa bekerja dibelakang meja, yang tidak menyukai ekspos yang berlebihan.

Dapat terlihat bahwa Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta merupakan dua sosok yang sama-sama saling mengisi. Keduanya bekerja saling mengisi dan saling membantu satu sama lain untuk tujuan yang sama yaitu pembangunan Kabupaten Purwakarta. Kepemimpinan yang saling melengkapi ini menjadi sangat efektif karena motivasi kedua pemimpin ini juga sama yakni melayani masyarakat, dan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Di antara keduanya telah terjadi semacam kesepakatan pembagian tugas bahwa Bupati perannya lebih dominan dalam mengurus masalah manajemen daerah seperti inovasi, *branding* daerah, pemasaran daerah, dan sebagainya, sedangkan Wakil Bupati lebih banyak mengurus urusan administrasi yang sifatnya birokratis. Duet Bupati dan Wakil Bupati yang secara individual mereka berbeda, memiliki talenta yang berbeda, tetapi begitu berpasangan menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangun atau memajukan Kabupaten Purwakarta. Kesamaan yang ada diantara kedua pemimpin ini adalah dari sikap kerakyatan, sikap tidak protokoler, dan mudah ditemui atau diakses oleh siapapun. Jarak antara mereka dengan masyarakatnya begitu dekat, begitu riil, sehingga tidak mengherankan kalau mereka sangat dicintai oleh masyarakatnya. Duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan salah satu contoh terbaik pasangan kepala dan wakil kepala daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

Dalam pandangan peneliti, jika model pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta bisa ditiru atau dikembangkan pada daerah-daerah lain di Indonesia, tentu rancangan Undang-Undang tentang pemilukada¹² yang akan menghapus jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) dengan alasan mereka sering berkonflik tidak perlu terjadi. Justru pengalaman Kabupaten Purwakarta menunjukkan betapa pemimpin tidak bisa sendiri, memimpin

¹² Pemerintah Pusat sudah cukup lama menyediakan rancangan UU tentang pemilukada, di mana direncanakan akan menghapus jabatan Wakil Kepala Daerah, namun demikian tindak lanjut akan hal ini tidak nampak progresnya karena dalam beberapa tahun sebelumnya ketika era kepemimpinan SBY-Boediono, energi dan perhatian politik banyak tersorot untuk persiapan pileg dan pilpres 2014, sehingga pembahasan RUU pemilukada ini agak tersendat-sendat.

membutuhkan *partner* yang bisa bekerjasama, saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain demi kemajuan daerahnya.

Penutup

Simpulan

Faktor pemimpin dan kepemimpinan merupakan faktor yang paling dominan dan utama dalam menentukan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Purwakarta. Faktor ini meliputi beberapa faktor, antara lain “ideologi” pemimpin, inovasi pemimpin, motivasi pemimpin “melayani”, ketegasan pemimpin, pemimpin rendah hati dan pemimpin saling melengkapi.

Saran

Faktor pemimpin dan kepemimpinan merupakan faktor dominan dan utama dalam menentukan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu penting untuk dikembangkan dan diperdalam lagi pengetahuan, pembelajaran atau pendidikan tentang pemimpin dan kepemimpinan sebagai *core* keilmuan bagi kurikulum prodi ilmu pemerintahan.

Daftar Pustaka

Dudley, G dan Richardson, J. 2000. *Why Does Policy Change?: Lessons from British Transport Policy 1945-1999*. New York: Routledge.

- Grindle, M.S. 2010. *Good Governance: The Inflation of an Idea*. Massachusetts: Harvard Kennedy School.
- IOG (*Institute of Governance*). 2012. *Defining Governance*. Melalui (<http://www.iog.ca/defining-governance>).
- J. W. Creswell. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approache*. Third edition, Los Angeles: Sage Publication, hlm. 181-185.
- Joshep A Maxwell. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. London, SAGE Pubications. Hlm. 78-79.
- Pierre, J. dan B. G. Peters. 2000. *Governance, Politics and The State*. Houndsmills, UK: Macmillan.
- R.A.W. Rhodes. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham, Open University Press, Hlm. 49.
- Sumarto, H. S. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor.
- UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. Melalui (<http://magnet.undp.org/policy/chapter1.htm>). Diakses pada tanggal 11 Mei 2016.
- UNESCAP (*United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific*), <http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>.) Diakses pada tanggal 11 Maret 2016.
- <http://www.riauonline.co.id/2015/08/21/bupati-purwakarta-pukauribuan-orang-saat-pidato-di-pbb>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
- <http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=18&date=2016-03-13>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
- <http://www.menpan.go.id/beritaterkini/2300-top-99inovasipelayanan-publik-di-indonesia>. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Tulisan ini dimuat oleh Majalah Lampar Edisi September 2015 Hlm. 8-9. Dede Supendi adalah Guru SDN 2 Tanjungsari dan Wakil Kepala SMPN Satu Atap 2 Sukajadi

Kec.Pondoksalam.<http://pendidikan.purwakartakab.go.id/index.php/artikel/view>.
Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

<http://www.nongkrongnews.com/2015/06/Indonesia-butuh-pemimpin-otentikbupati.html>. Diakses
pada tanggal 20 Maret 2016.

<http://www.riauonline.co.id/2015/08/21/bupati-purwakarta-pukau-ribuanorang-saat-pidato-di-pbb>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

<http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=18 &date=2016-03-13>. Diakses pada tanggal 20
Maret 2016.

Survei LSI Tahun 2013. Lembaga Survei Indonesia.